

**DAMPAK DISKRIMINASI GENDER TERHADAP
TINGKAT PUTUS SEKOLAH PEREMPUAN DAN
AKSES TERHADAP PELUANG KERJA DI KOTA
MAKASSAR**

**Maemunah, Sam'un Mukramin,
Lukman Ismail, Andi Nursida**
Universitas Muhammadiyah
Makassar
maemunah@unismuh.ac.id
samun88@yahoo.co.id
lukmanismail@unismuh.ac.id
andinursida@unismuh.ac.id

Abstract

This study examines the impact of gender discrimination on female dropout rates and their access to employment opportunities in Makassar City, Indonesia. This study used a qualitative approach with in-depth interviews with 30 women aged 15 to 30 who dropped out of school or had difficulty accessing employment. The results showed that female dropout rates ranged from 15-20%, which was caused by social norms that prioritize women's traditional roles, lack of family support, and economic constraints. Only 25% of women from low-income families continued their education to college. Gender discrimination also hinders women from accessing formal employment, with the majority trapped in the informal sector with low incomes. This study highlights the need for effective policy interventions to improve education and employment opportunities for women. These findings provide insights for policy makers to create an environment that supports gender equality in education and employment, while changing public perceptions about women's roles. This study is expected to be a reference for efforts to improve women's welfare in Makassar.

Keywords: Gender Discrimination, Female Dropout, Employment Opportunities

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dampak diskriminasi gender terhadap angka putus sekolah perempuan dan akses mereka terhadap kesempatan kerja di Kota Makassar, Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap 30 perempuan berusia 15 hingga 30 tahun yang putus sekolah atau mengalami kesulitan mengakses pekerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka putus sekolah perempuan berkisar antara 15-20%, yang disebabkan oleh norma sosial yang lebih mengutamakan peran tradisional perempuan, kurangnya dukungan keluarga, dan kendala ekonomi. Hanya 25% perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Diskriminasi gender juga menghambat perempuan dalam mengakses pekerjaan formal, dengan mayoritas terjebak di sektor informal dengan pendapatan rendah. Penelitian ini menyoroti perlunya intervensi kebijakan yang efektif untuk meningkatkan pendidikan dan

kesempatan kerja bagi perempuan. Temuan ini memberikan wawasan bagi para pembuat kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesetaraan gender dalam pendidikan dan pekerjaan, sekaligus mengubah persepsi publik tentang peran perempuan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi upaya peningkatan kesejahteraan perempuan di Makassar.

Kata Kunci: Diskriminasi Gender, Putus Sekolah Perempuan, Kesempatan Kerja

Pendahuluan

Keadilan dalam kehidupan masyarakat seharusnya dapat dinikmati oleh semua orang tanpa mengenal status, jabatan, ras, suku, atau jenis kelamin, sehingga tercipta kehidupan sosial yang adil dan makmur tanpa adanya diskriminasi, namun realitas dalam kenyataannya, ternyata masih banyak ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat salah satunya, seperti membed jenis kelamin antar laki-laki dan perempuan dari segi biologis (Kemenpppa, 2018). Ketidakadilan dan diskriminasi terjadi hampir di semua bidang, mulai dari yang terendah hingga pada level internasional. Diskriminasi pun juga terjadi dalam berbagai bidang kehidupan sosial seperti ekonomi, politik, agama, pendidikan dan budaya bahkan sampai pada tingkatan wilayah kerja (Akbar et al., 2019).

Salah satu tujuan pembangunan adalah mewujudkan sumber daya manusia indonesia seutuhnya, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam UUD 1945 pasal 27 dinyatakan bahwa adanya jaminan kesamaan hak bagi seluruh warga negara, baik laki maupun perempuan termasuk anak-anak di depan hukum. Upaya peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan telah tersirat dalam lima filsafah dasar indonesia yaitu pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Pancasila sebagai cara dan filsafah hidup bangsa indonesia, tidak membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yang dinyatakan setiap warga negara mempunyai status, hak, dan kewajiban, serta kesempatan yang sama dalam keluarga dan masyarakat (Mandasari, 2022).

Perilaku yang melanggar hak asasi manusia di sebut diskriminasi (Ihrohmi, 2006), diskriminasi gendre masih menjadi masalah serius dimasyarakat, termasuk dikota makassar. Diskriminasi *gender* adalah perbedaan, penyingkiran atau pembatasan begitupun sebaliknya yakni pilih kasih yang dilakukan seseorang karena alasan *gender*, sehingga

mengakibatkan penolakan keterlibatan, pelanggaran atas pengakuan hak asasi dan hak dasarnya dalam bidang politik, ekonomi maupun sosial (Effendi & Ratnasari, 2018).

Diskriminasi *gender* masih terjadi seluruh aspek kehidupan, di seluruh dunia. Hal ini merupakan sebuah fakta meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan *gender* ini. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai wilayah dan negara. Perempuan menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan *gender* yang terjadi, namun pada dasarnya diskriminasi *gender* tentunya merugikan semua orang. Praktik diskriminasi ini memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan perempuan, terutama dalam hal pendidikan dan peluang kerja. Salah satu dampak paling nyata dari diskriminasi *gender* adalah tingginya tingkat putus sekolah di kalangan perempuan.

Tingginya angka putus sekolah di kota Makassar dapat dilihat dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada juni 2023 angka putus sekolah tingkat sekolah dasar (SD) di Makassar mencapai 0,13%, SMP 1,06 %, dan SMA 1,38% Ronalyw, (2024), hal ini tidak hanya menghambat pendidikan perempuan, tetapi juga membatasi akses mereka terhadap peluang kerja yang lebih baik. Perempuan yang tidak mendapatkan pendidikan yang memadai sering kali terjebak dalam pekerjaan informal dengan penghasilan yang rendah dan kurang stabil. Selain itu, stigma sosial dan norma budaya yang menganggap rendahnya pendidikan perempuan semakin meningkatkan kesejahteraan, sehingga menciptakan siklus diskriminasi yang berkelanjutan.

Stigma sosial dan norma budaya yang menganggap rendahnya pendidikan perempuan semakin memperburuk keadaan (Yovita et al., 2022). Berbagai komunitas mengatakan, pendidikan dianggap kurang penting bagi perempuan yang sering kali dipandang hanya sebagai pengurus rumah tangga (Ardiansyah et al., 2024). Pandangan ini tidak hanya menempatkan perempuan pada posisi yang tidak setara, tetapi juga memperkuat siklus kemiskinan dan ketidakberdayaan. Ketika perempuan tidak terdorong untuk melanjutkan pendidikan, mereka kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam bersaing di pasar kerja. Akibatnya, perempuan yang terputus dari pendidikan berisiko terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Permasalahan ini

menjadi semakin kompleks dengan keterbatasan efektivitas program pemerintah dalam mengatasi hambatan pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan di wilayah tersebut.

Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa dampak diskriminasi gender tidak hanya bersifat individual, tetapi juga bersifat sistemik. Ketidakadilan yang dialami perempuan dalam dunia pendidikan akan menimbulkan efek domino yang merugikan, baik bagi mereka sendiri maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam hubungan antara diskriminasi gender, tingkat putus sekolah perempuan, dan akses peluang kerja. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak diskriminasi ini, diharapkan dapat diidentifikasi langkah-langkah strategi untuk meningkatkan pendidikan dan pemberdayaan perempuan, serta memperjuangkan kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, kami dapat berkontribusi pada pencapaian masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang tanpa terhalang oleh gender.

Tinjauan Pustaka

Gambaran bagaimana diskriminasi gender bukan hanya bentuk ketidakadilan individual, tetapi juga memperkuat struktur ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Pada penelitian ini untuk memberikan pemahaman teoritis dan konseptual mengenai: 1) bentuk dan dampak diskriminasi gender di masyarakat; 2) hubungan diskriminasi gender dengan tingginya angka putus sekolah Perempuan; 3) hambatan yang dihadapi perempuan dalam mengakses pekerjaan formal.

1. Diskriminasi Gender sebagai Pelanggaran HAM

Ihrohmi, (2006) diskriminasi gender dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena menolak pengakuan dan keterlibatan perempuan secara setara dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Memerangi diskriminasi gender bukan sekadar isu sosial atau budaya, tetapi merupakan tanggung jawab moral dan hukum dalam penegakan hak asasi manusia. Upaya menghapus diskriminasi gender berarti memperjuangkan keadilan, kesetaraan, dan pembangunan sosial yang inklusif.

2. Kesenjangan Gender yang Bersifat Sistem Sosial Yang Struktural

Akbar et al., (2019); Effendi & Ratnasari, (2018) disebutkan bahwa diskriminasi gender terjadi dalam berbagai bidang dan bersifat sistemik, tidak hanya di tingkat lokal, namun juga global. Memahami bahwa kesenjangan gender bersifat sistemik adalah langkah awal yang krusial dalam membangun masyarakat yang inklusif dan adil. Ini bukan hanya soal memperbaiki ketidakadilan di satu bidang, melainkan membongkar dan membenahi keseluruhan sistem yang bias gender sejak akar-akarnya.

3. Pendidikan Perempuan dan Faktor Sosial Budaya

Pendidikan sebagai alat mobilitas sosial sangat dipengaruhi oleh konteks sosial budaya. Dalam perspektif sosiologi pendidikan, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen reproduksi sosial (Bourdieu, 1984). Dalam masyarakat yang menganut nilai-nilai patriarki, pendidikan sering kali bersifat eksklusif, di mana akses dan kesempatan sangat dipengaruhi oleh kelas sosial dan gender. Hal ini menyebabkan perempuan yang berasal dari kelompok miskin dan marjinal menjadi lebih rentan mengalami keterbatasan akses pendidikan.

Norma patriarki menempatkan perempuan sebagai subjek domestik, bukan publik, yang menyebabkan mereka dipinggirkan dari sistem pendidikan. Budaya patriarki mengonstruksi peran perempuan sebatas pengasuh dan pengurus rumah tangga, sehingga hak mereka atas pendidikan formal sering kali diabaikan. Hal ini selaras dengan pandangan feminisme struktural yang menyatakan bahwa struktur sosial berperan aktif dalam mereproduksi ketimpangan gender melalui institusi seperti keluarga dan pendidikan (Mansour Faqih, 2010). Norma ini bahkan tertanam dalam kebijakan dan kurikulum yang tidak sensitif terhadap perbedaan gender, sehingga memperkuat eksklusi perempuan dari ruang publik.

Studi yang dilakukan oleh Ardiansyah et al., (2024); Yovita et al., (2022) Perempuan diposisikan sebagai pengurus rumah tangga, bukan sebagai subjek aktif dalam pendidikan dan pekerjaan. Dengan demikian, pendidikan perempuan tidak dapat dipisahkan dari

konteks sosial-budaya di mana ia tumbuh. Melawan diskriminasi dalam pendidikan berarti menantang sistem patriarki yang telah lama melekat, serta membangun kesadaran kolektif bahwa perempuan juga merupakan subjek aktif yang berhak belajar, berdaya, dan memimpin.

Konsekuensinya, perempuan lebih rentan mengalami putus sekolah, yang berdampak pada terbatasnya akses ke pekerjaan dan pengembangan diri. Data dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa perempuan dengan pendidikan terbatas lebih banyak terjebak dalam sektor informal dengan penghasilan rendah dan kondisi kerja yang tidak layak (Sarina, 2021). Tidak hanya itu, keterbatasan pendidikan juga berdampak psikologis, seperti rendahnya rasa percaya diri, lemahnya kemampuan mengambil keputusan, dan ketergantungan ekonomi yang tinggi kepada pasangan (Salsaila, 2024). Situasi ini melanggengkan ketidaksetaraan gender lintas generasi dan memperbesar risiko kemiskinan struktural di kalangan perempuan.

Oleh karena itu, upaya membongkar hegemoni patriarki dalam pendidikan memerlukan pendekatan interseksional yang mempertimbangkan aspek gender, kelas, budaya, dan kebijakan. Pendidikan yang adil gender harus mendorong kesetaraan kesempatan, baik dalam hal akses, proses, maupun hasil pembelajaran, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman spesifik perempuan.

4. Dampak Ekonomi dan Psikologis

Diskriminasi mengakibatkan perempuan tidak bisa mengakses pekerjaan yang layak dan berpenghasilan baik, dan menimbulkan dampak psikologis seperti rendahnya kepercayaan diri (Salsaila, 2024). Oleh karena itu, menghapus diskriminasi gender dalam dunia kerja bukan hanya soal keadilan ekonomi, tapi juga kesehatan mental dan martabat manusia. Perempuan membutuhkan lingkungan kerja yang adil, aman, dan suportif untuk berkembang secara utuh sebagai individu.

Sedangkan berdasarkan pencermatan dari berbagai sumber akademik dan kebijakan nasional seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, yang menekankan persamaan hak tanpa diskriminasi gender. Kemudian laporan dan kebijakan dari Kementerian PPPA (2018) mengenai pentingnya sinergi dalam pencapaian kesetaraan gender.

Tinjauan Teoritis

Diskriminasi gender merupakan bentuk ketidakadilan sosial yang menempatkan individu atau kelompok pada posisi yang tidak setara berdasarkan identitas gendernya, baik secara eksplisit maupun implisit. Secara konseptual, diskriminasi gender dapat diartikan sebagai perlakuan yang membedakan hak, akses, partisipasi, serta pengakuan terhadap seseorang semata-mata karena mereka adalah laki-laki atau perempuan. Perbedaan ini seringkali tidak berdasarkan kompetensi, kapasitas, atau kontribusi, melainkan didasarkan pada norma dan stereotip sosial yang mengakar dalam struktur masyarakat.

Diskriminasi gender tidak hanya terjadi dalam konteks relasi antarindividu, misalnya antara atasan dan bawahan, atau suami dan istri, tetapi juga dilembagakan dalam sistem sosial. Hal ini terlihat dari kebijakan-kebijakan publik yang bias gender, kurikulum pendidikan yang tidak inklusif, serta norma-norma budaya yang menginternalisasi pandangan bahwa perempuan kurang rasional, kurang kompeten, dan lebih cocok untuk peran domestik. Sehingga diskriminasi menjadi sistemik, bukan sekadar insiden terisolasi. Sistemik berarti bahwa diskriminasi terjadi secara terstruktur dan berlangsung dalam jangka waktu panjang, serta diperkuat oleh nilai-nilai sosial yang diteruskan secara lintas generasi.

Kerangka teori institusional, lembaga-lembaga sosial seperti sekolah, tempat kerja, dan sistem hukum memainkan peran penting dalam mereproduksi norma gender. Sebagai contoh, ketika kebijakan rekrutmen atau promosi karier lebih menguntungkan laki-laki karena dianggap lebih “tegas” atau “rasional”, maka secara tidak langsung telah terjadi penghambatan akses perempuan dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

Gender sendiri merupakan konsep sosial yang dikonstruksikan melalui budaya, bukan semata-mata bersifat biologis (seks). Butler (1990), dalam konsepnya tentang *gender performativity*, menjelaskan bahwa identitas gender dibentuk melalui tindakan berulang yang sesuai dengan ekspektasi sosial. Oleh karena itu, ketika masyarakat mengharapkan perempuan untuk bersikap lembut, tunduk, dan hanya berperan di ranah domestik, maka setiap bentuk penyimpangan dari ekspektasi tersebut dianggap tidak sah. Dalam sistem seperti ini, perempuan yang ingin mengakses pendidikan tinggi atau karier profesional seringkali dianggap “melanggar kodrat”.

Konsekuensinya, diskriminasi bukan hanya membatasi hak, tetapi juga mempengaruhi identitas dan agensi perempuan. Banyak perempuan yang tumbuh dalam sistem ini menginternalisasi peran subordinat tersebut sehingga merasa tidak layak atau tidak pantas untuk mengejar cita-cita yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa diskriminasi gender bersifat tidak hanya material, tapi juga simbolik dan psikologis.

Sistem patriarki mengonstruksi norma yang mengutamakan laki-laki dalam berbagai aspek, termasuk pendidikan dan pekerjaan. Hal ini mengakibatkan akses terhadap sumber daya vital, seperti pendidikan tinggi dan pekerjaan formal, lebih banyak terbuka bagi laki-laki. Misalnya, dalam konteks pendidikan, perempuan sering kali diposisikan sebagai individu yang tidak memerlukan pendidikan tinggi karena akan berakhir di ranah domestik (Ardiansyah et al., 2024; Yovita et al., 2022). Penempatan ini diperkuat oleh budaya dan kebijakan publik yang bias gender, yang melegitimasi pembagian peran berdasarkan stereotip tradisional.

Hal ini menyebabkan perempuan sering kali tersisih dari akses terhadap sumber daya yang vital, termasuk pendidikan tinggi dan pekerjaan formal. Dampaknya tidak hanya bersifat material, seperti rendahnya pendapatan dan terbatasnya kesempatan kerja, tetapi juga bersifat simbolik dan psikologis. Diskriminasi berulang dapat menurunkan rasa percaya diri, menciptakan ketidakberdayaan, dan bahkan menyebabkan gangguan kesehatan mental (Salsaila, 2024). Di Kota Makassar, seperti ditunjukkan dalam penelitian ini, diskriminasi gender berkontribusi besar terhadap tingginya angka putus sekolah perempuan dan rendahnya partisipasi mereka dalam pekerjaan formal yang layak. Mayoritas perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah hanya dapat mengakses sektor informal yang tidak menjamin keberlanjutan ekonomi (Mukramin, 2023).

Lebih lanjut, diskriminasi ini bukan hanya persoalan individu, tetapi merupakan bagian dari sistem sosial yang lebih luas. Ketika institusi pendidikan, pasar tenaga kerja, dan lingkungan sosial memperkuat eksklusi terhadap perempuan, maka diskriminasi menjadi sistemik. Sistemik dalam hal ini berarti bahwa ketidaksetaraan dibangun dan dipelihara secara berulang dan berlapis oleh struktur yang tampak normal atau wajar dalam masyarakat (Bourdieu, dalam Mansour Faqih, 2010). Untuk itu, mengatasi diskriminasi

gender memerlukan pendekatan lintas sektor yang mencakup reformasi kebijakan, transformasi budaya, dan pemberdayaan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan dalam penelitian yang fokus pada fenomena atau gejala yang terjadi secara alami (Abdussamad, 2021; Creswell, 2017). Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman dan perspektif perempuan yang menghadapi diskriminasi serta mengeksplorasi dampak diskriminasi gender terhadap tingkat putus sekolah perempuan yang mempengaruhi akses mereka terhadap peluang kerja. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive (Lenaini, 2021), dengan total 30 informan perempuan berusia 15 hingga 30 tahun yang telah mengalami putus sekolah dan kesulitan dalam mengakses pekerjaan.

Profil informan menunjukkan keragaman dalam latar belakang pendidikan dan status pekerjaan, mayoritas berasal dari keluarga dengan tingkat pendidikan rendah. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif serta wawancara mendalam semi-terstruktur untuk menggali pengalaman terkait diskriminasi (Sugiyono, 2018). Setiap wawancara direkam dan ditranskrip, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik yang merupakan metode analisis kualitatif yang melibatkan pengelompokan data berdasarkan tema atau pola tertentu melalui langkah-langkah seperti familiarisasi dengan data, pengkodean, pencarian tema, peninjauan tema, dan interpretasi (Abdussamad, 2021). Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil observasi dan wawancara. Selain itu member-checking pun dilakukan dengan meminta konfirmasi dari beberapa informan tentang interpretasi data yang dibuat oleh peneliti, serta audit trail yang disusun untuk merekam proses penelitian secara transparan. Metode ini diharapkan memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana diskriminasi gender memengaruhi kehidupan perempuan di Kota Makassar, khususnya dalam hal pendidikan dan pekerjaan, sekaligus memberikan dasar untuk rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Hasil dan Pembahasan

Dampak signifikan diskriminasi gender terhadap tingkat putus sekolah perempuan dan akses mereka terhadap peluang kerja di Makassar melalui analisis mendalam terhadap lima informan yang mewakili berbagai latar belakang. Berdasarkan hasil wawancara, teridentifikasi bahwa seluruh informan mengalami hambatan serius dalam pendidikan yang disebabkan oleh norma sosial dan kondisi ekonomi yang mengedepankan pendidikan laki-laki. Mereka melaporkan bahwa masyarakat di sekitar mereka sering kali menganggap pendidikan perempuan tidak sepenting pendidikan laki-laki, yang berimplikasi pada rendahnya motivasi orang tua untuk mendukung pendidikan anak perempuan.

Dari informan yang diteliti, terungkap bahwa diskriminasi gender berkontribusi besar pada siklus kemiskinan yang melibatkan perempuan. Ketidakmampuan mereka untuk mengakses pendidikan yang baik secara langsung berpengaruh pada potensi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Penelitian ini juga menyoroti dampak psikologis yang dialami oleh para informan akibat diskriminasi. Situasi seperti ini menciptakan rasa putus asa dan ketidakberdayaan, yang berpotensi mengulangi siklus ketidakadilan bagi generasi berikutnya. Informan lainnya juga menunjukkan perasaan serupa, di mana pengalaman diskriminatif tidak hanya membatasi akses mereka tetapi juga mempengaruhi pandangan mereka terhadap masa depan.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa meskipun ada beberapa program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan dan kesempatan kerja bagi perempuan, efektivitasnya masih sangat terbatas. Banyak dari program-program ini tidak menjangkau komunitas yang paling membutuhkan, atau tidak cukup kuat untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap pendidikan perempuan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih holistik dan inklusif yang melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor, termasuk pendidikan, pemerintah, dan masyarakat.

Sehingga meskipun ada upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender, banyak perempuan di Makassar masih menghadapi tantangan besar yang menghalangi mereka untuk mencapai potensi penuh mereka. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi diskriminasi ini, mulai dari peningkatan kesadaran masyarakat hingga kebijakan yang lebih inklusif dalam pendidikan dan dunia kerja.

Table 1. Table Description

No	Description	Explanation
1.	Tingkat Putus Sekolah Perempuan	a. Analisis tingkat putus sekolah perempuan berdasarkan data lokal b. Faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mendorong putus sekolah, seperti peran domestik perempuan dan kurangnya dukungan keluarga
2.	Pengaruh Norma Sosial dan Stigma Budaya	a. Peran norma sosial yang mengutamakan pendidikan laki-laki dibandingkan perempuan b. Dampak stigma budaya terhadap motivasi pendidikan perempuan
3.	Diskriminasi dalam Akses Pekerjaan	a. Hambatan perempuan dalam mendapatkan pekerjaan formal b. Perbedaan perlakuan dan penghasilan antara pekerja laki-laki dan perempuan
4.	Siklus Kemiskinan Akibat Diskriminasi Gender	a. Hubungan antara rendahnya pendidikan perempuan dan keterbatasan akses ke pekerjaan yang layak b. Kontribusi diskriminasi gender terhadap perpetuasi siklus kemiskinan
5.	Dampak Psikologis Akibat Diskriminasi	a. Pengaruh diskriminasi terhadap rasa percaya diri perempuan b. Dampak jangka panjang terhadap generasi berikutnya
6.	Efektivitas Program Pemerintah	a. Evaluasi program pendidikan dan kesempatan kerja bagi perempuan di Makassar b. Hambatan implementasi program pada komunitas lokal. tempat kerja
7.	Peran Stakeholder dalam Mengatasi Diskriminasi Gender	a. Rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kesetaraan gender b. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta

Sumber: Olahan Data Lapangan

1. Faktor Penyebab Putus Sekolah Perempuan

Tingkat putus sekolah perempuan di kota Makassar dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi yang kompleks. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama, dimana banyak keluarga tidak mampu membiayai pendidikan anak perempuan. Keterbatasan pendapatan orang tua sering kali memaksa anak perempuan untuk berhenti sekolah demi membantu perekonomian keluarga, selain itu, peran domestik perempuan juga memberikan

kontribusi signifikan terhadap putus sekolah. Anak perempuan sering kali diwajibkan untuk mengambil alih tanggung jawab rumah tangga, yang mengurangi waktu dan kesempatan mereka untuk melanjutkan pendidikan. Hal ini menciptakan siklus di mana pendidikan perempuan tidak dianggap prioritas, sehingga menghambat kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di masa depan.

Kurangnya dukungan keluarga menjadi faktor lain yang memperburuk situasi ini. Lingkungan yang tidak mendukung pendidikan dapat mempengaruhi motivasi anak perempuan untuk tetap bersekolah. Penelitian menunjukkan bahwa dukungan emosional dan finansial dari keluarga sangat penting untuk keberhasilan pendidikan anak, dan ketika dukungan ini minimal, angka putus sekolah cenderung meningkat (Pratiwi, 2024).

Berikut tabel yang menggambarkan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat putus sekolah perempuan di Kota Makassar:

Table 2. Table Description

No	Faktor Utama	Penjelasan	Dampak
1	Faktor ekonomi	Keluarga tidak mampu membiayai pendidikan anak perempuan	Anak perempuan terpaksa berhenti sekolah untuk membantu perekonomian keluarga
2	Peran domestik Perempuan	Anak perempuan diharapkan mengambil tanggung jawab rumah tangga sejak usia muda	Mengurangi waktu dan kesempatan mereka untuk fokus pada pendidikan formal
3	Norma sosial	Pendidikan perempuan dianggap kurang penting dibandingkan pendidikan anak laki-laki	Siklus ketidaksetaraan berlanjut, membatasi akses perempuan ke pendidikan yang lebih tinggi
4	Kurangnya dukungan keluarga	Minimnya motivasi dan dukungan emosional atau finansial dari keluarga untuk melanjutkan pendidikan	Anak perempuan kehilangan semangat untuk belajar, yang meningkatkan angka putus sekolah
5	Stigma budaya	Perempuan dianggap lebih cocok untuk peran domestik daripada peran pendidikan atau profesional	Anak perempuan tidak didorong untuk mengejar pendidikan tinggi, membatasi peluang kerja

Sumber: Olahan Data Lapangan

Masalah ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan bagi anak perempuan dan menyediakan program beasiswa atau dukungan finansial bagi keluarga berpenghasilan rendah. Dukungan ini dapat membantu mengurangi angka putus sekolah di kalangan anak perempuan dan memberi mereka kesempatan yang lebih baik untuk masa depan.

2. Dampak Norma Sosial dan Stigma Budaya

Norma sosial yang mengutamakan pendidikan laki-laki dibandingkan perempuan memberikan kontribusi besar terhadap tingkat putus sekolah perempuan di Makassar. Dalam masyarakat yang masih kental dengan nilai-nilai patriarki, pendidikan sering kali dianggap sebagai hak yang lebih pantas untuk laki-laki. Norma ini menciptakan stigma negatif terhadap perempuan yang mengejar pendidikan tinggi, sehingga banyak dari mereka yang terpaksa berhenti sekolah demi memenuhi ekspektasi sosial (Sumin et al., 2024).

Dampak stigma budaya ini juga terlihat dalam motivasi pendidikan perempuan. Ketika perempuan dihadapkan pada pandangan bahwa peran utama mereka adalah sebagai istri dan ibu rumah tangga, hal ini dapat menurunkan semangat mereka untuk belajar dan berprestasi di bidang akademik. Sebuah penelitian menemukan bahwa banyak perempuan merasa tertekan untuk memilih jalur hidup tradisional, yang mengakibatkan rendahnya partisipasi mereka dalam pendidikan formal (Nur, 2018).

Untuk mengatasi diskriminasi gender ini, diperlukan perubahan yang mendalam terhadap norma sosial dan budaya yang menghambat perempuan. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Ini termasuk kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan, pelatihan keterampilan, dan dukungan emosional dan finansial bagi perempuan yang ingin melanjutkan pendidikan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perempuan dapat lebih berpartisipasi dalam pendidikan, membuka kesempatan kerja yang lebih luas, dan mengurangi kesenjangan gender di masa mendatang (Nawisa et al., 2022).

3. Diskriminasi Alam Akses Pekerjaan

Diskriminasi dalam akses pekerjaan formal bagi perempuan di Makassar menjadi masalah yang signifikan, di mana banyak perempuan menghadapi hambatan untuk mendapatkan posisi yang setara dengan laki-laki. Stereotip gender yang menganggap perempuan lebih lemah dan kurang mampu memimpin menyebabkan mereka sering kali terpinggirkan dalam dunia kerja (Sarina, 2021). Ketidaksetaraan ini tidak hanya berkaitan dengan struktur sosial tetapi juga dipengaruhi oleh tradisi yang mengatur kehidupan pernikahan. Hal ini diperburuk dengan anggapan bahwa perempuan yang sudah menikah seharusnya tidak bekerja, sehingga mengurangi kesempatan mereka untuk berkontribusi secara ekonomi (Mukramin, 2023).

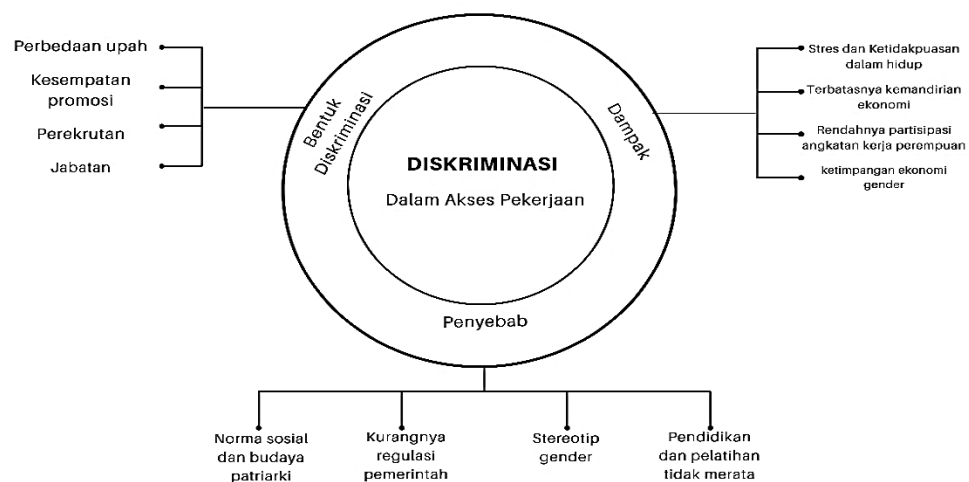
Perbedaan perlakuan antara pekerja laki-laki dan perempuan terlihat jelas dalam hal penghasilan. Banyak penelitian menunjukkan kesenjangan upah yang signifikan, di mana perempuan sering kali dibayar lebih rendah dibandingkan laki-laki untuk pekerjaan yang setara. Kesenjangan ini tidak hanya mencerminkan diskriminasi secara langsung tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang tidak adil, di mana perempuan merasa kurang dihargai dan termotivasi untuk maju dalam karir mereka (Prawira & Sulastri, 2024).

Diskriminasi gender berdampak signifikan terhadap rasa percaya diri perempuan, sering kali menimbulkan perasaan rendah diri dan ketidakamanan. Ketika perempuan mengalami perlakuan yang tidak adil, baik di lingkungan pendidikan maupun di tempat kerja, mereka cenderung merasa tidak dihargai dan kurang mampu. Penelitian menunjukkan bahwa pengalaman diskriminasi ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental, seperti kecemasan dan depresi, yang selanjutnya mempengaruhi kepercayaan diri mereka (Salsabila, 2024). Ketidaksetaraan dalam akses pekerjaan formal dan perlakuan yang berbeda dalam dunia kerja dapat mengakibatkan perempuan merasa tertekan untuk memilih jalur hidup tradisional, menghambat kemajuan mereka dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan intervensi yang fokus pada penghapusan stigma budaya dan norma sosial yang membatasi peran perempuan di tempat kerja (Kasih et al., 2024).

Pandangan ini tidak hanya membatasi kesempatan perempuan untuk maju, tetapi juga memperkuat ketimpangan dalam partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan

perempuan. Hal ini mencerminkan bias gender yang mengakar dalam di tempat kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak adil di mana perempuan merasa kurang dihargai. Efek dari diskriminasi ini tidak hanya meluas ke pendapatan mereka, tetapi juga ke motivasi dan aspirasi karier mereka. Ketimpangan dalam pekerjaan formal juga memengaruhi pilihan pendidikan dan jalur karir perempuan. Perempuan yang merasa bahwa kesempatan kerja mereka terbatas cenderung tidak mengejar pendidikan tinggi, sehingga semakin melanggengkan siklus ketimpangan.

Gambar 1. Diskriminasi dalam akses pekerjaan



4. Upaya Mengatasi Dampak Diskriminasi Gender

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan intervensi dari berbagai pihak, antara lain:

- Peningkatan kesadaran publik mengenai kesetaraan gender dan pentingnya pendidikan serta pekerjaan bagi perempuan merupakan langkah krusial dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil. Melalui pendidikan, perempuan tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga memahami hak-hak mereka, yang pada gilirannya memberdayakan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi (Afifah et al., 2024).
- Pemerintah daerah perlu mengadopsi kebijakan afirmatif yang mendorong akses perempuan ke pendidikan dan pekerjaan sebagai langkah strategis untuk mencapai

kesetaraan gender. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif dapat meningkatkan keterwakilan perempuan dalam posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan, yang pada gilirannya akan menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan (Cakrawikara, 2017).

- c. Peningkatan fasilitas pendidikan yang memberikan akses pendidikan yang lebih inklusif dan aman bagi perempuan, termasuk penyediaan beasiswa khusus, sangat penting untuk mencegah putus sekolah. Selain itu, lingkungan pendidikan yang ramah dan bebas dari kekerasan sangat diperlukan agar perempuan merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan angka putus sekolah di kalangan perempuan dapat diminimalisir, sehingga mereka dapat berkontribusi lebih besar dalam pembangunan sosial dan ekonomi (Arianto, 2023).
- d. Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan kerja, kewirausahaan, dan program pemberdayaan ekonomi sangat penting untuk meningkatkan akses perempuan terhadap pekerjaan dan peluang usaha. Program-program ini tidak hanya memberikan keterampilan praktis yang diperlukan untuk memasuki dunia kerja, tetapi juga mendorong perempuan untuk menjadi wirausaha yang mandiri. Penelitian menunjukkan bahwa ketika perempuan diberikan pelatihan kewirausahaan, mereka dapat mengembangkan usaha yang tidak hanya meningkatkan pendapatan keluarga tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal (Sari & Sulastri, 2024). Selain itu, pemberdayaan perempuan di sektor-sektor seperti industri rumput laut dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan memperkuat posisi perempuan dalam perekonomian lokal (Nengsi et al, 2024). Dengan demikian, dukungan dari pemerintah dan sektor swasta dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan jaringan bisnis sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan inisiatif.

Peran pemangku kepentingan dalam mengatasi diskriminasi gender di Kota Makassar sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung kesetaraan gender. Berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga sektor swasta, memiliki tanggung jawab bersama untuk mengatasi ketimpangan gender dalam berbagai aspek kehidupan, terutama pendidikan dan ketenagakerjaan. Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya akan memberdayakan perempuan, tetapi juga memperkuat tatanan sosial dan ekonomi secara keseluruhan. Kesetaraan gender harus menjadi prioritas lintas sektoral untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting dalam mengatasi diskriminasi gender. Pemerintah dapat bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu kesetaraan gender melalui kampanye publik dan program pendidikan. Selain itu, sektor swasta dapat berperan aktif dengan menerapkan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di tempat kerja, seperti program pelatihan dan pengembangan karir untuk perempuan (Nadia, 2022).

Penutup

Diskriminasi gender masih menjadi kendala serius bagi kemajuan perempuan di Kota Makassar, khususnya di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan. Tingginya angka putus sekolah pada perempuan disebabkan oleh berbagai faktor, seperti norma sosial yang mengutamakan pendidikan laki-laki, peran domestik perempuan yang dianggap lebih penting, tekanan ekonomi keluarga, serta kurangnya dukungan emosional dan finansial dari keluarga. Data menunjukkan bahwa stigma budaya yang menganggap pendidikan perempuan kurang penting semakin memperparah situasi ini.

Dampak diskriminasi gender tidak hanya dirasakan pada level individu tetapi juga sistemik. Perempuan yang putus sekolah lebih mungkin terjebak pada pekerjaan informal dengan pendapatan rendah, sehingga memperkuat siklus kemiskinan. Ketimpangan di dunia kerja, seperti kesenjangan upah, bias gender dalam rekrutmen, dan kurangnya akses bagi perempuan pada posisi strategis, semakin membatasi kesempatan mereka untuk maju. Akibatnya perempuan akan kehilangan rasa percaya diri dan perasaan yang tidak berdaya

yang akan menjadi efek dalam jangka Panjang. Beberapa Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi diskriminasi gender meliputi:

1. Meningkatkan kesadaran publik melalui kampanye publik yang menekankan pentingnya pendidikan bagi anak perempuan dan perlunya kesetaraan gender dalam semua aspek kehidupan.
2. Memberikan beasiswa dan insentif pendidikan bagi anak perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah untuk mengurangi angka putus sekolah.
3. Menghilangkan kesenjangan upah gender melalui peraturan yang memastikan upah yang sama untuk pekerjaan yang bernilai sama.
4. Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan keterampilan, kewirausahaan, dan program berbasis masyarakat yang dapat membantu perempuan menjadi mandiri secara ekonomi.
5. Kolaborasi antara pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk membuat kebijakan yang mendukung kesetaraan gender secara lebih efektif.
6. Meningkatkan akses ke program pemerintah dengan mengatasi kebutuhan khusus masyarakat yang rentan terhadap diskriminasi.

Olehnya, penting untuk melakukan langkah-langkah strategis yang lebih holistik dan inklusif, yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Ini termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan untuk perempuan, memberikan dukungan sosial yang kuat, serta merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi diskriminasi gender. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang mendukung kesetaraan bagi perempuan, sehingga setiap individu, tanpa memandang gender, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z. (2021). Metode penelitian Kualitatif. CV. Syakir Media Press.
- Afifah, Z., Ratu, Z., Dara, S., Cahya, Z., & Putra, R. (2024). Transformasi Sosial : Peran Penting Kesetaraan Gender Dalam Pencapaian Hak Asasi Manusia. *1*(1), 12–16.
- Akbar, Z., Arifudding, H., Wulandari, & Sartria, V. A. (2019). Diskriminasi Gender dalam Lingkungan Kerja. *Ayan*, *8*(5), 55.
- Ardiansyah, A., Jailani, M. S., & Isma, A. (2024). Pendidikan Telaah Kritis Paradigma dan Problematika Perempuan di Indonesia. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, *6*(4), 4345–4355. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i4.7408>
- Arianto, S. (2023). Tekad, Wujudkan Sekolah Inklusi. Baktinews.
- Bourdieu, P. (1984). *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. Harvard University Press.
- Butler, J. (1990). *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. Routledge.
- Cakrawikara. (2017). *Kebijakan Afirmatif untuk Mengoreksi Ketimpangan Gender*. Cakrawikara Indonesia.
- CEDAW. (1979). *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*. United Nations.
- Cresswell, J. W. (2017). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi ketiga. In *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Effendi, A., & Ratnasari, R. (2018). Diskriminasi Gender dalam Perspektif Sosial. Rajawali Pers.
- Handayani, Wuri. "Diskriminasi Gender dalam Pendidikan." *Muwazah* 10, no. 2 (2018): 198–224. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v10i2.1784>.
- Ihrohmi. (2006). Diskriminasi Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Pustaka Belajar.
- Kasih, O. M., Amanda, Y., Syalsabillah, H., Linda, S., Putri, A., Nathaniella, A., Sadiawati, D., Studi, P., Hukum, I., & Hukum, F. (2024). Diskriminasi Gender dan Tindakan Asusila terhadap Wanita dalam Dunia Pekerjaan. *Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(2), 281–291.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2018). *Kesetaraan Gender: Perlu Sinergi Antara Kementrian ? Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat, Laporan Pemerintah*.
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling. *HISTORIS*:

- Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.4075>
- Mandasari, N. (2022). Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DP3AP2 Provinsi Jambi). *Ebisma (Economics, Business, Management, & Accounting Journal)*, 2(2), 50–59. <https://doi.org/10.61083/ebisma.v2i2.17>
- Mansour Faqih. 2010. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 7
- Mukramin, S. U., & Salsabila, S. S. (2024). Diskriminasi Gender dalam Perkawinan Keturunan Sayyid di Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan. *Jurnal Setara: Studi Gender dan Anak*, 6(2).
- Nita Riyana. (2021). “Makalah Studi Literatur Kesempatan Kerja Yang Setara Dalam Melindungi Diskriminasi Gender di Tempat Kerja”, Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Hlm. 5-6
- Nadia, S. (2022). *pemberdayaan perempuan untuk kesetaraan*. Kementrian keuangan.
- Nawisa, Nuh, M. S., & Razak, A. (2022). Implementasi 30% Keterwakilan Perempuan Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Kota Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 3(2), 200–215.
- Nengsi, S., Mukramin, S. U., & Amin, S. (2024). Perempuan sebagai Agen Perubahan: Kontribusi dalam Industri Rumpuk Laut dan Kesejahteraan Keluarga. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 4(2), 1500-1512.
- Nurfahirah, Amara, Yulinda Try Dewi, and Dini Dwi Gustiana. “Upaya United Nations Women (UN Women) dalam Menangani Diskriminasi Terhadap Perempuan di Afghanistan.” *TRANSBORDERS: International Relations Journal* 5, no. 2 (2022): 102–14. <https://doi.org/10.23969/transborders.v5i2.5297>.
- Nur, R. J. (2018). *Peran Gender dalam Budaya Lokal Siri’ Na Pacce*.
- Nurdin, Aulia Anjani, Ananda Ratu Mawaddah, Nayla Putri Abdullah, Natasya Yadilla, and Qurrotul Aini. “2024 Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Pengaruh Keterbatasan Akses Pendidikan Terhadap Tingginya Angka Putus Sekolah Dikaitkan Dengan SDGs” 2, no. 9 (2024): 660–74.
- Pratiwi, P. A. (2024). Kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan United Nations Children’s Fund (UNICEF) dalam Rencana Aksi Percepatan Pengurangan Jumlah Anak Tidak Sekolah di Sulawesi Selatan. *JILS (Journal of International and Local Studies)*, 8(2), 118–132. <https://doi.org/10.56326/jils.v8i2.4501>

- Prawira, Y. I., & Sulastri, R. (2024). Kesetaraan Hak Antara Karyawan Laki-Laki Dan Perempuan Di Kebun Binatang Bandung. *Gunung Djati Conference Series, 39*(The 2nd Students Conference of Social Science, Political Science, and Public Administration (SCoSPPA)), 39–44.
- Effendi, P., & Ratnasari, D. (2018). Kesetaraan gender dalam prespektif undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
- Ratna, Ameliya. “Perilaku Diskriminasi Gender Dalam Pandangan Socio Legal,” 1984, 133–54.
- Riant Nugroho. 2011. *Gender dan Strategi Pengarus-Utamanya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 9-16.
- Ronalyw. (2024). 140.017 Anak di Sulsel Putus dan tidak Sekolah. Berita Kota Makassar.
- Salsaila, S. (2024). Dampak Ketidaksetaraan Gender terhadap Kesehatan Mental. Kompasiana.
- Sari, R. A., & Sulastri, R. (2024). Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Ekonomi di Karawang. *Gunung Djati Conference Series, 39*, 45–53.
- Sarah Zhafira. “Diskriminasi Gender Pada Gamers Perempuan.” Elibrary UNIKOM, no. 2020 (2022): 41818188. <http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/7325>.
- Sari, A. R., Alvandi, A., Putri, N. A., Khairani, N. H., Zafarina, Y., & Febrianty, Y. (2024). Perilaku Diskriminasi Gender dalam Pandangan Socio Legal (UU No. 7 Tahun 1984). *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan*, 7(2), 133-154.
- Sarina. (2021). Diskriminasi gender terhadap perempuan pekerja di kawasan industri Makassar. *Pinisi Journal of Sociology Education Review*, 1(2), 64.
- Siscawati, Mia. (2023). “Tiga Ranah Penting dalam Penanganan Diskriminasi Gender di Dunia Pendidikan”, Depok: Universitas Indonesia, Hlm. 1
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sumin, N., Arifin, J., & Makassar, U. M. (2024). 2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Perspektif Sosiologi Mahasiswa PGSD Universitas Muhammadiyah Makassar Terhadap Sistem Perkawinan Bugis Makassar 2024 Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin. 2(1), 511–515.
- Wulandari, I W, H Nafilah, D Virnanda, and “The Impact of Gender Discrimination in the World of Work on Women’s Welfare and Mental Health in the Makassar Region: English.” Tamansiswa 8, no. 1 (2023). <https://jurnal.stiekn.ac.id/index.php/taji/article/view/522>.
- Yovita, K., Dwi, A., Kristina, A., & Pardede, G. (2022). Stigma Masyarakat Terhadap

Perempuan sebagai Strata Kedua dalam Negeri. *Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya, 01(01), 401–411.*